

Pemilu Jangan Jadi Drama Pelanggengan Kekuasaan



Suasana pencoblosan saat Pilkada Sleman 2020 (ilustrasi).

KR-Fadmi Sustiwi

HARI-hari ini, Republik dalam pertarungan besar. Apakah demokrasi akan mati secara perlahan dan akhirnya terjerumus pada satu tirani kekuasaan? Ataukah, kita bergotong-royong, bersama-sama menyelamatkan demokrasi?

Sepotong pertanyaan itu dilontarkan pemikir kebhinnekaan Dr Sukidi dalam pidato kebangsaan saat UllSoreNyastra#2 'Senjakala Demokrasi Indonesia', beberapa waktu lalu. Pertanyaan itu dilontarkan, karena menurut Sukidi, demokrasi kita hari-hari ini ditelikung secara brutal dengan pendekatan kekuasaan.

"Kekuasaan berpusat pada seorang otokrat, tiran dengan menggunakan instrumen hukum untuk melayani kepentingan politik dan keluarganya," ungkap Sukidi Dalam pidato panjang, Sukidi kemudian menyebut, demokrasi bisa diselamatkan setidaknya dengan tiga instrumen: *Pertama*, meletakkan prinsip meritokrasi, agar semua anak Indonesia memiliki impian bersama, kesempatan setara memajukan Republik. *Kedua*, *mutual tolerantion*. Sikap menoleransi satu dengan yang lain. Ini merupakan ikhtiar, *tepa slira* dan sistem *fairness* yang harus diciptakan. *Ketiga*, ada sikap sabar untuk tidak melakukan intervensi pada lembaga lain lain terutama lembaga hukum demi kepentingan politik. ***

Hukum dan demokrasi di

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi dalam realita masyarakat, sangat jelas. Pakar hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum Ull Prof Dr Budi Agus Riswandi menunjukkan realita yang tidak bisa diingkari. Menurutny, melemahnya demokrasi, rusaknya penegakan hukum bahkan ditandai 'pembajakan' Mahkamah Konstitusi, meningkatnya korupsi, ketidaknetralan pejabat, pembentukan Undang Undang yang manipulatif dan lainnya, makin jelas.

Semua bermuara pada aktivitas politik bernama Pemilu 2024. Semakin mendekati pemilihan presiden-wakil presiden dan menjelang Pemilu 2024, suasana kian 'tidak baik-baik saja'. Ingin melanggengkan kekuasaan, seakan menjadi tujuan akhir dengan menghalalkan segala cara. Suasana yang menyadarkan cendekiawan kampus, budayawan, dan para nasionalis pencinta negeri kini lantang mengajak masyarakat cerdas memilih. Memilih pemimpin berdasar rekam jejak dan program kerja yang tidak melanggar demokrasi dan keadilan bagi masyarakat. Dan tentu sesuai nuraninya.

"Bila kali ini rakyat dan para tokoh nasional tak mampu melawan kedzaliman penyelenggaraan Pemilu, amat dikhawatirkan, Pemilu hanya menjadi drama pelanggengan kekuasaan bagi elite politik. Bahkan serta-merta pemberlanjutan penindasan

mayoritas rakyat," ucap Guru Besar Ilmu Hukum FH UGM Prof Dr Sudjito kepada *Kedaulatan Rakyat*. Dalam situasi demikian, Pemilu bukan mendekatkan tercapainya tujuan bernegara, melainkan melapangkan oligarki mencaplok kedaulatan negara.

Meski terseok, diwarnai 'pelbagai persoalan' bahkan sempat diusulkan ditunda, tekad melaksanakan Pemilu 2024 dengan tepat waktu menjadi komitmen anak bangsa. Lembaga Swadaya Masyarakat pun gencar melakukan literasi politik. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR) Nurlia Dian Paramita menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan JPPR dalam mencerdaskan politik masyarakat adalah peningkatan literasi, baik literasi politik maupun literasi digital. Kedua literasi ini menurut Paramita, harus seiring dan saling melengkapi.

"Kita tahu bahwa sebagian masyarakat tahu tentang politik tapi dia gagap dengan digital. Akhirnya akan kalah dengan mereka yang ahli di dunia digital sekalipun minim dalam dunia politik. Bisa jadi akan ada informasi yang secara fakta tidak diterima menyeluruh. Sehingga hoaks dan <l>hate speech<p> masih bisa berkeliaran



Membaca nama pemilih di sebuah TPS di Minomartani dalam Pilkada Sleman 2020 (ilustrasi).

KR-Fadmi Sustiwi



KR-Fadmi Sustiwi

Menghitung kartu suara dalam Pilkada Sleman 2020 (ilustrasi).

dalam mengisi pemahaman politik yang salah di masyarakat," ucap Paramita kepada <l>Kedaulatan Rakyat<p> terpisah.

Sementara, pakar politik UMY Dr Ane Permatasari dalam Pendidikan Politik Kelompok Marginal 'Demokrasi untuk Semua' mengingatkan dan mengajak memilih fokus dan paham bila kita bukan hanya akan memilih presiden-wakil presiden saja. Namun Pemilu mendatang, bangsa Indonesia juga akan memilih legislatif, wakil rakyat. "Wakil yang lebih dekat dengan kita, yang akan memperjuangkan persoalan yang dihadapi kita paling tidak tingkat

kabupaten/kota," ujar Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas UMY pekan lalu, dalam acara yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah. ***

Pemilu adalah aktivitas politik. Selain memilih wakil rakyat, Pemilu menjadi komitmen bangsa untuk memilih pemimpin: presiden-wakil presiden secara demokratis. Ironisnya, bangsa ini disebut Sudjito, belum siap dan tidak pernah disiapkan untuk berpolitik dengan benar, sesuai falsafah Pancasila.

"Pemilu sebagai politik praktis, tidak mencerminkan aktivitas sosial-kebangsaan yang menghormati kedaulatan rakyat. Justru rakyat direkayasa, dibeli suaranya, ditipu dan dipaksa memilih melalui aneka kecurangan. Kecurangan bersifat masif dan sistemik. Sulit diharapkan terselenggara Pemilu yang jujur dan adil," ucap Sudjito.

Miris. Situasinya sudah salah kaprah. Pemilu menjadi ajang pertarungan partai politik. Sehingga demi kemenangan segala macam cara ditempuh. "Etika diabaikan. Hukum dan bahkan pelaksanaannya yang terkait, sudah jauh-jauh hari dikooptasi penguasa," katanya.

Rakyat melihat dan merasakan langsung keculasan aturan maupun praktik di lapangan, tetapi tak berdaya. Apalagi menurutnya, intimidasi dilakukan terhadap siapa pun yang terindikasi oposisi. Bahkan teror terhadap keluarganya. (Fadmi Sustiwi)

WISATA Kraton Kanoman, Tersembunyi di Belakang Pasar



Mande Manguntur, ikon utama Kraton Kanoman.

KR-Fadmi Sustiwi



Bangsal Witana, bangunan tertua, cikal bakal Kraton Cirebon.

KR-Fadmi Sustiwi

KRATON adalah tempat tinggal penguasa raja atau ratu. Bagi Raja atau Sultan di Jawa, kraton merupakan pusat kebudayaan sekaligus pusat pemerintahan. Dan karena menjadi pusat pemerintahan, kraton sering dijadikan lambang pusat kekuasaan raja.

Miris. Memasuki Kraton Kanoman, Cirebon, harus melewati pasar dengan jalan yang hanya pas sebuah mobil, di antara lapak pedagang buah. Sementara, tidak ada akses lain untuk bisa memasuki Kraton Kanoman yang dibangun Pangeran Mohamad Badridin atau Pangeran Kertawijaya, yang bergelar Sultan Anom I sekitar 1678 M. Penulis membayangkan, bagaimana jika wisatawan menggunakan bus?

Tetapi itulah fakta yang ada. Bukan kesalahan pedagang apalagi pasar. Ternyata itulah upaya kolonial menjauhkan Raja dengan rakyatnya adalah kisah di baliknya. Di masa silam, area Alun-alun Kanoman merupakan area terluar dari kompleks Kraton Kanoman. Sebelum tahun 1924, Alun-alun Kanoman dapat terlihat dari jalan besar di Utaranya. Sisi sebelah Timur adalah pasar dan sisi Barat menjadi lokasi Masjid Agung Kraton Kanoman. Sementara sebelah Selatan adalah area Ksiti Hinggil, Lemah Dhuwur yang salah satunya berisi bangunan Mande Manguntur.

Belanda berniat menjauhkan Kraton Kanoman dari rakyat Cirebon. Hal ini dilakukan karena Kraton Kanoman jadi pusat menentang Belanda. Apalagi,

Februari 1818 M terjadi pemberontakan besar-besaran rakyat Cirebon. Untuk mencegah terjadinya kembali perlawanan besar-besaran, Belanda menggembosi wibawa Kraton, dengan memperluas pasar. Selain kawasan jual-beli masyarakat di sebelah Timur Alun-alun, dibuat perluasan di atas sebagian tanah Alun-alun di sebelah Utara. Otomatis Kraton Kanoman tidak bisa langsung terlihat dari jalan besar di Utaranya karena sudah tertutup bangunan pasar yang diselesaikan Belanda pada 1924.

Tragisnya, kini menyebut nama 'Kanoman' adalah identik pasar ketimbang Kraton. Saprudin, pengemudi taksi online yang asli Cirebon bahkan mengaku tidak tahu ada Kraton Kanoman. Yang dikenal

adalah Pasar Kanoman.

Pesona Lawang Ikon Kraton Kanoman ialah Mande Manguntur. Bangunan di dalam Ksiti Hinggil ini menurut Sani merupakan tempat Sultan menyampaikan wejangan, tempat duduk Sultan ketika menyaksikan upacara di Kraton Kanoman, Cirebon. Sementara Bangsal Sekaten di dekatnya, sebagai tempat Gamelan Sekaten peninggalan Sunan Kalijaga.

Uniknya, daya tarik dan pesona Kraton Kanoman yang sekitar 6 hektare luasnya, ada pada beberapa pintu atau lawang: Lawang Syahadatein menghadap ke Utara, Lawang Kiblat menghadap ke Barat, Lawang Salawat menghadap ke Selatan. Menurut Ratu Raja Arimbi Nurtina yang dikutip liputan6.com

(15/9/2018) masing-masing memiliki makna filosofi. "Seseorang yang ingin mencapai derajat tinggi, harus membaca Syahadat sebagai syarat Muslim," jelasnya.

Sedang Lawang Kiblat memiliki makna bila salah satu kewajiban Muslim adalah melaksanakan ibadah salat dan Lawang Salawat bermakna agar Muslim senantiasa mengucapkan Salawat Nabi Muhammad yang merupakan junjungan dan teladan umat Islam. Selain itu juga masih ada Lawang Siblawong yang hanya dibuka untuk keluar-masuk perangkat Kraton saat Ritual Panjang Jimat (puncak Maulid).

Meski merupakan kerajaan yang menyebarkan Agama Islam, namun bangunan-bangunan maupun lawang yang ada mendapat pengaruh dari



Kereta Kencana Paksi Naga Liman dan Kereta Jempana asli.

KR-Fadmi Sustiwi



Lawang Kiblat.

KR-Fadmi Sustiwi